

PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN PADA BUMDES DESA TLOGOSARI KEC.TIRTOYUDO

by Reword.iduno493@web.de Reword.iduno493@web.de

Submission date: 07-Mar-2025 11:14PM (UTC-0600)

Submission ID: 2604996091

File name: 33579.pdf (326.41K)

Word count: 3644

Character count: 23926

PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN PADA BUMDES DESA TLOGOSARI KEC.TIRTOYUDO

Ana Khoirul Aisa¹, Yuda Ramadhani², Adita Nafisa³

^{1,2,3} Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Anakhoirul281@gmail.com

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDESA/BUMDes) are part of village institutional resources with economic scope. The main problem with BUMDes is the lack of management that occurred after the institution was officially formed. Moreover, the obstacles that are often indicated are problems regarding financial management procedures, in addition to other factors such as the limited capacity of BUMDes managers and weak supervisory functions. BUMDes managers have limited knowledge, understanding and ability to manage, administer and report business finances. This condition is an obstacle to business continuity and sustainable progress of BUMDes as a productive economic enterprise in the village which is expected to be able to support community welfare. So that community service activities are carried out through a pattern of providing assistance to BUMDes managers in Tlogosari Village, Tirtoyudo District who are experiencing problems, especially with financial reporting. This mentoring activity is carried out through three stages, namely observation, mentoring and evaluation. From the aspect of financial governance, it was found that the effectiveness of financial administration and the preparation of financial reports with accountability and transparency were weak.

Keywords: BUMDes, Financial Governance.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA/BUMDes) merupakan bagian dari sumberdaya kelembagaan desa dengan cakupan ekonomi. Permasalahan utama BUMDes adalah tidak adanya pengelolaan yang terjadi setelah lembaganya resmi dibentuk. Apalagi kendala yang sering terindikasi yaitu permasalahan mengenai prosedur pengelolaan keuangan, di samping faktor lain seperti keterbatasan kemampuan pengelola BUMDes dan lemahnya fungsi pengawasan. Para pengelola BUMDes mempunyai keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaporkan keuangan usaha. Kondisi ini menjadi penghambat kelangsungan usaha dan kemajuan yang berkesinambungan BUMDes sebagai usaha ekonomi produktif di desa yang diharapkan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pola pendampingan bantuan kepada pengelola BUMDes di Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo yang mengalami kendala khususnya pada pelaporan keuangan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu observasi, pendampingan, dan evaluasi. Dari aspek tata kelola keuangan ditemukan lemahnya efektifitas administrasi keuangan dan pembuatan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola Keuangan

Submitted: 2024-06-01

Revised: 2024-06-18

Accepted: 2024-08-22

PENDAHULUAN

Salah satu program unggulan dalam pemberdayaan perekonomian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA/BUMdes). Undang-undang tentang Desa pada tahun 2014 memberikan kewenangan bagi desa melalui dana desa dalam mengalokasikan sumberdaya keuangannya untuk pemberdayaan ekonomi desa, yang salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA/BUMdes). Diatur pula dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87, menyatakan bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan; dan (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes sendiri disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Pada hakikatnya BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.

BUMDESA sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDESA yang di bidangi yakni ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDESA serta melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDESA. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah desa dan yang mengelola adalah masyarakat secara kolektif. Adanya lembaga sosial ini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat menuju desa yang lebih maju dan sejahtera dengan menggali serta menggunakan potensi yang dimiliki desa dengan baik dan maksimal.

Menurut data dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2021), jumlah BUMDES di Indonesia pada tahun 2014 adalah 1.022 unit, sampai dengan saat ini jumlah BUMDES pada tahun 2021 adalah 57.273 unit. Perkembangan BUMDES meningkat tajam setiap tahunnya. Menurut data potensi desa (PODES) 2020, mencatat pada tahun 2020 sejumlah 21.000 desa tidak memiliki BUMDES. BUMDES di Jawa Timur dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemula, berkembang dan maju. Total BUMDES di Jawa Timur pada tahun 2018-2021 adalah 6.426 BUMDES. Dengan rincian BUMDES pemula sebanyak 3.069, BUMDES berkembang sebanyak 2.312 dan BUMDES maju sebanyak 1.045. Menurut dari DPMD (2021) banyak desa yang tidak memiliki BUMDES di Provinsi Jawa Timur yaitu sejumlah 1.721. Menurut DPMD Provinsi Jawa Timur (2021), Kabupaten Malang memiliki jumlah BUMDES sebanyak 235 BUMDES. Dengan rincian 54 BUMDES maju, 80 BUMDES berkembang dan 97 BUMDES pemula. Sebanyak 159 Desa belum memiliki BUMDES. Kondisi ini ditengarai karena pengelolaan BUMDes yang masih kurang bagus, sebagian besar BUMDes bergerak di usaha simpan pinjam dan bukan di sektor usaha, dana yang dikelola relatif rendah, serta kemampuan jiwa usaha pengelola yang rendah dan fungsi pengawasan yang kurang.

Regulasi terbaru dalam Permendesa dan PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan dana desa harus diprioritaskan untuk penguatan segala bentuk kegiatan ekonomi desa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membangun ekonomi kreatif dengan memanfaatkan semua peluang di desa. Salah satu elemen penting dalam penguatan

perekonomian desa adalah melalui pengembangan BUMDes yang didukung oleh kemampuan sumberdaya pengelola dalam menjalankan usaha BUMDes. Implementasi regulasi ini perlu didukung pengelolaan BUMDes dan kapasitas pengelola yang memiliki kemampuan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun demikian sebagian BUMDes mengalami permasalahan dalam pengelolaannya. Dari 45.549 BUMDes yang ada di desa-desa Indonesia sebanyak 90% belum dapat berjalan dengan baik, yang diindikasikan karena masalah prosedur pengelolaan keuangan BUMDes (Resti, 2019).

Studi Agunggunanto dkk. (2016) pada BUMDes di Kabupaten Jepara mengungkapkan banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes karena kurang siapnya desa dan minimnya potensi yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan keterbatasan jenis usaha yang dijalankan, pengetahuan dan kemampuan pengelola BUMDes serta partisipasi masyarakat yang rendah. Sejalan dengan temuan sebelumnya hasil penelitian Titioka dkk. (2020) menyatakan dalam pengelolaan BUMDes diperlukan ketrampilan dan komitmen penerapan tata kelola laporan keuangan sesuai siklus akuntansi karena masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang tata kelola BUMDes yang baik, akuntabel dan transparan. Dari aspek pengawasan menurut Oktaviani & Nuswantara (2020) pada BUMDes di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa tingkat implementasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada BUMDes masih rendah. Hal ini mengimplikasikan bahwa tata kelola keuangan BUMDes menjadi faktor krusial keberhasilan pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes harus transparan dan berorientasi pada proses serta dikelola secara profesional oleh SDM kompeten yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang akuntansi (Musafa, Hernawan & Dewi, 2018). BUMDES merupakan kunci kekuatan perekonomian desa sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab karena BUMDes adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh seluruh masyarakat desa, dan bukan hanya perorangan atau kelompok tertentu. Dengan pengelolaan potensi ekonomi dan alokasi sumberdaya dengan tepat maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian Dwiningwarni & Amrulloh (2020) mendukung argumentasi tersebut bahwa keberadaan BUMDes sangat diperlukan oleh masyarakat dan alokasi dana desa untuk program pemberdayaan melalui BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan BUMDes adalah tata kelola keuangan. Melalui tata kelola keuangan yang baik maka BUMDes menjadi lembaga ekonomi desa yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pertanggungjawaban sehingga akan didukung oleh masyarakat desa. Kesulitan dalam pengelolaan keuangan BUMDes menjadi permasalahan pada sebagian besar BUMDes yang ada, tidak terkecuali BUMDes di Desa Tlogosari yang berada di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil survei awal menunjukkan bahwa pengelola BUMDes hanya melakukan pengelolaan keuangan secara umum seperti pencatatan kas dan pelaporan dengan cara sederhana. Meskipun tata cara seperti ini dianggap sebagai hal yang umum dan sudah biasa dilakukan, maka akan sulit untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil usaha BUMDes maupun tindakan pengawasannya karena terbatasnya dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes.

Sesuai dengan Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 pengelolaan BUMDes harus mencakup 4 tahapan yaitu penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengendalian

internal. Tujuannya agar BUMDes yang dimiliki oleh masyarakat desa menjadi akuntabel dan transparan dalam pengelolaannya serta dapat dievaluasi kinerjanya sehingga dapat berkembang menjadi usaha ekonomi masyarakat desa yang semakin maju. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes memerlukan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adanya laporan keuangan BUMDes akan membantu mencerminkan kondisi keuangan usaha dan berperan dalam membantu pengambilan keputusan di masa mendatang (Irawati & Martanti, 2017). Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mendampingi pengelola BUMDes pada Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo dalam melakukan dan memperbaiki tata kelola keuangan BUMDes menjadi lebih baik sejalan tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Satu masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMDESA Tlogosari adalah kurangnya tenaga sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan, hal tersebut perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan BUMDESA dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Serta perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUMDESA Telaga Makmur di desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo dalam pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis. Melalui kegiatan pendampingan kepada pengelola BUMDes, dapat dirancang dokumen penatausahaan dan pelaporan usaha BUMDes sehingga dapat digunakan sebagai mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan usaha BUMDes dan tindakan pengawasan yang diperlukan. Pada akhirnya hasil kegiatan pendampingan tata kelola keuangan BUMDes dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola BUMDes sehingga menjadi usaha pemberdayaan ekonomi desa yang transparan dan akuntabel.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan yang fokus memberikan pengetahuan dasar tentang penyusunan laporan keuangan khususnya laporan arus kas. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan di Balai Desa Tlogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 16 Januari hingga 16 Februari 2023 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*, yaitu suatu metode yang digunakan dalam mendapatkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap objek yang diinginkan. Serta, Observasi, guna memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap keadaan yang sebenarnya. Adapun, sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola BUMDES Desa Tlogosari.
2. Pelatihan dan Pendampingan. Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan, para pengelola BUMDES Desa Tlogosari diminta untuk mengaplikasikan materi ke dalam praktik penyusunan laporan keuangan. Pada kegiatan pendampingan ini dilakukan pula interaksi dan timbal balik sehingga tim pengabdian dapat mengetahui ketercapaian materi yang sudah disampaikan.
3. Metode Survey dilakukan setelah kegiatan berakhir dengan tujuan untuk melihat progres pengelolaan keuangan yang telah disampaikan oleh tim pengabdian serta

mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dalam hal melakukan pengelolaan laporan keuangan BUMDes.

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian

No.	Kegiatan	Minggu			
		1	2	3	4
1.	Tahap Persiapan: Observasi/Wawancara pengelola BUMDESA				
2.	Tahap Pelaksanaan: Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan				
3.	Tahap Survey: dilakukan setelah kegiatan berakhir dengan tujuan untuk melihat progres pengelolaan keuangan				

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu wawancara/observasi pada minggu pertama, pelatihan/pendampingan penyusunan laporan keuangan pada minggu kedua dan ketiga, dilanjutkan dengan survey hasil pada minggu keempat. Tahap observasi digunakan semaksimal mungkin untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan mendasar terhadap sasaran kegiatan ini yaitu peserta kegiatan ini yaitu pengelola BUMDESA di Desa Tlogosari. Tahap Pelatihan digunakan untuk menyampaikan materi berbentuk slide presentasi dan narasumber menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan tentang definisi, istilah-istilah, tujuan, dan manfaat pengelolaan keuangan secara komprehensif. Serta pengkhususan materi mengenai penyusunan arus kas. Dilanjutkan kegiatan pendampingan yang berbentuk diskusi kelompok (*focus grup discussion*) atau secara mandiri baik di kantor BUMDESA maupun di rumah pengelola BUMDESA.





Dokumentasi Kegiatan observasi/wawancara dan pelatihan

Hasil dari kegiatan pelatihan dipakai untuk mengidentifikasi seberapa jauh pemahaman peserta dengan materi yang disampaikan. Peserta diberikan form laporan keuangan dan diminta untuk mengisi sesuai dengan catatan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya hasil dari pengisian form tersebut didiskusikan pada saat pendampingan. Selama proses pendampingan, tim pengabdian menerima umpan balik dari peserta sebagai masukan dan bahan evaluasi. Pendampingan ini mewajibkan pengelola BUMDESA wajib membuat laporan keuangan setiap periode sesuai dengan data aktual. Penyusunan laporan keuangan sendiri bertujuan sebagai sumber informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, fungsi laporan keuangan menurut Hery (2015) antara lain: (1) Mengetahui posisi keuangan dalam suatu periode; (2) Mengetahui kelemahan; (3) Mengetahui kekuatan; (4) Menentukan langkah perbaikan di masa yang akan datang; (5) Penilaian kinerja manajemen; dan (6) Perbandingan dengan lembaga sejenis. Apabila penyusun laporan keuangan memahami tujuan dan fungsi dari laporan keuangan, dapat memberikan sugesti bahwasanya laporan keuangan yang dibuat harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terutama pada laporan arus kas.

Selama ini pengurus Unit Usaha BUMDESA sudah membuat catatan arus kas keuangan, namun masih sangat sederhana berupa catatan aliran dana, yaitu dana masuk dan dana keluar. Catatan terdiri dari tanggal (sebagian besar adalah tanggal mencatat, bukan tanggal transaksi), keterangan transaksi dan jumlah nominal uang yang dikeluarkan, bahkan beberapa transaksi tidak terdapat bukti berupa nota/kwitansi. Pengelola BUMDESA secara garis besar tidak memiliki latar belakang ilmu keuangan/akuntansi tetapi memiliki inisiatif membuat catatan keuangan sederhana dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sumber informasi keuangan internal merupakan hal baik yang patut diapresiasi. Semangat dan keinginan tinggi untuk terus melakukan perkembangan merupakan kunci utama dalam memajukan usaha.

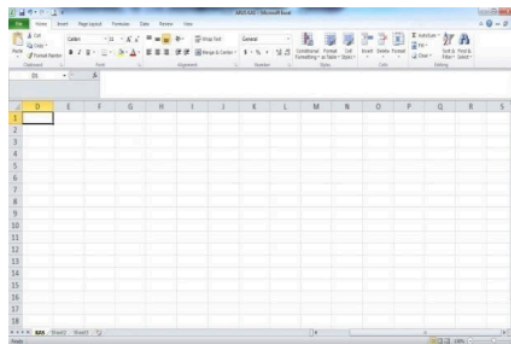
Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, peserta diperkenalkan tentang komponen-komponen dari penyusunan laporan arus kas. Lebih jauh lagi, tim pengabdian memberikan penjelasan mendalam melalui praktik tentang masing-masing akun yang ada di laporan arus kas, cara mencatat transaksi, dan cara mendapatkan informasi dari transaksi. Kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya istilah-istilah akuntansi yang baru diketahui, sehingga masih sulit untuk mengidentifikasikannya. Melihat kondisi ini tim

pengabdian menyampaikan kembali menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta memberikan contoh menyesuaikan dengan kegiatan riil yang sering peserta temui.

Dalam rangka peningkatan tujuan dapat diterapkan sehari-hari dan mempermudah penyimpanan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, maka pendampingan juga dilanjutkan dengan memberikan arahan dalam membuat laporan arus kas pada aplikasi Microsoft Office Excel. Tahapan ini juga menerapkan pengetahuan teknologi melalui perangkat komputer. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, khususnya laporan arus kas. Peserta hanya mencatat bukti transaksi aktivitas keuangan yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar, kemudian data tersebut dapat secara otomatis menghasilkan laporan dengan tujuan memudahkan BUMDESA mengetahui secara sederhana kinerja keuangan dalam satu periode.

Langkah awal pembuatan laporan arus kas dengan aplikasi excel adalah mengelompokkan transaksi aktivitas BUMDESA, secara garis besar aliran kas dari aktivitas instansi antara lain; aliran kas dari aktivitas operasi, aliran kas dari aktivitas investasi dan aliran kas dari aktivitas pendanaan. Dengan melakukan identifikasi pada arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan mengelompokkan transaksi melalui penggunaan akun transaksi (perkiraan/rekening) pada pos/kolom debet "DB" posisi arus kas masuk, yaitu semua transaksi keuangan yang masuk dalam perusahaan yang diperoleh dari pendapatan dan penjualan. Sedangkan pada pos/kolom kredit "KR" posisi arus kas keluar yang diperoleh dari pembelian barang dan biaya maupun beban, maka laporan arus kas dapat disajikan. Berikut langkah-langkah pembuatan laporan arus kas dengan aplikasi excel, sebagai berikut:

- a. Langkah awal pembuatan laporan arus kas dengan menggunakan Microsoft office "Excel", langkah pertama buka aplikasi Microsoftoffice pilih aplikasi excel, maka akan nampak seperti pada gambar di bawah ini.



Tampilan awal pada: Microsoft Office "Excel"

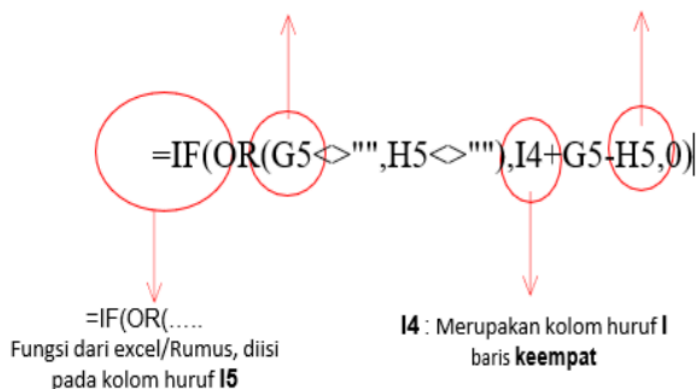
- b. Langkah selanjutnya buat tabel transaksi arus kas sesuai dengan kolom dan baris yang ada pada aplikasi Microsoft office excel, dalam penyajian transaksi arus kas minimal memuat; kolom tanggal transaksi, kolom kode bukti transaksi, kolom bukti kas masuk dan kas keluar, kolom jenis transaksi, kolom akun perkiraan kas, dan kolom nominal mutasi arus kas. Adapun tahapan proses transaksi sebagai berikut ini:

- Tanggal : Kolom "**tanggal**" diisi dengan tanggal setiap transaksi yang terjadi dari transaksi arus uang masuk dan arus uang keluar.
- Kode : Kolom "**kode**" diisi dengan kode nomor nota atau nomor faktur setiap transaksi dan harus sesuai dengan tanggal transaksi.
- Kas : Kolom "**kas**" diisi dengan kode Bukti Kas Masuk "**BKM**" dan Bukti Kas Keluar "**BKK**" kolom kas ini sebagai control transaksi uang masuk dan keluar untuk meminimalisir kesalahan input transaksi.
- Transaksi : Kolom "**transaksi**" diisi dengan kegiatan bisnis atau aktivitas dari uang masuk dan uang keluar, seperti; pembelian, penjualan, ongkos, dan pendapatan.
- Akun : Kolom "**akun**" sebagai media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Dasar pencatatan untuk debit "**DB**" dan kredit "**KR**" adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan pendapatan.
- Mutasi Kas : Kolom "**mutasi kas**" diisi dengan jumlah nominal uang yang ditransaksikan pada kolom "**debit**" berarti diisi dengan uang masuk dan pada kolom "**kredit**" diisi dengan jumlah uang keluar yang berasal dari kas. Sedangkan, pada kolom "**saldo**" akan terisi dengan sendiri berapa saldo kas akhir setiap transaksi terjadi, kolom saldo menggunakan rumus: $=IF(OR(G5<>"",H5<>""),I4+G5-H5,0)$.

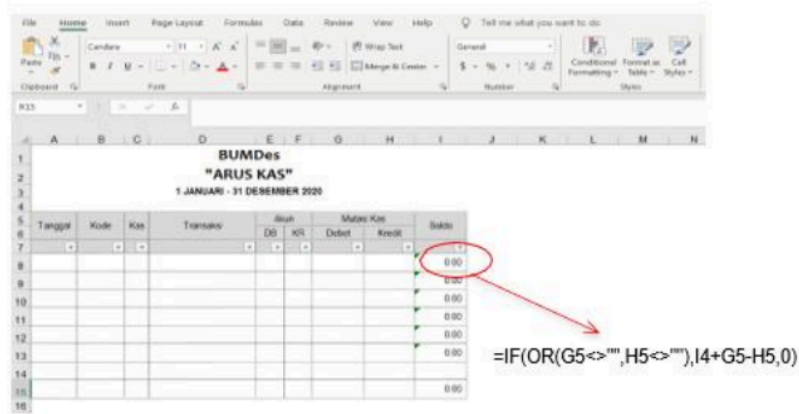
FUNGSI PADA APLIKASI MICROSOFT OFFICE EXCEL

G5 : Merupakan kolom huruf G baris kelima

H5 : Merupakan kolom huruf G baris kelima

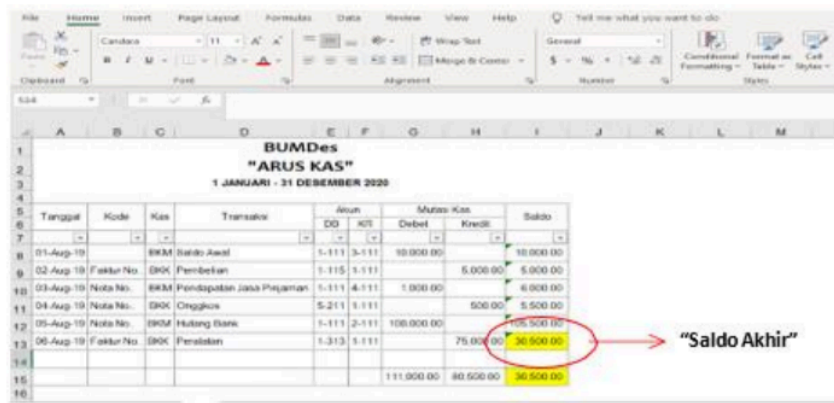


Hasil penyajian pada aplikasi excel:



Setelah langkah 2 tersusun seperti pada gambar diatas selanjutnya mencoba hasil rumus saldo dari mutasi arus kas, seperti pada gambar dibawah ini.

Rumus dengan fungsi **IF**.



Rumus saldo akhir mutasi kas telah siap untuk dijalankan langkah selanjutnya adalah membuat akun/kode rekening pada setiap penerimaan arus kas masuk dan arus kas keluar.

- c. Langkah selanjutnya setelah rumus siap dijalankan mengidentifikasi transaksi yang berkaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Tanggal	Kode	Kas	Transaksi	Akun	Mutasi Kas	Saldo
				DO	KR	
01-Aug-19		BKM	Saldo Awal	1-111 3-111	2000,00	10.000,00
02-Aug-19	Faktor No	BKK	Pembelian	1-115 1-111	5.000,00	5.000,00
03-Aug-19	Nota No	BKM	Pendapatan Jasa Pelayanan	1-111 4-111	1.000,00	5.000,00
04-Aug-19	Nota No	BKK	ongkos	6-211 1-111	500,00	5.500,00
05-Aug-19	Nota No	BKM	Atang ibank	1-111 2-111	100.000,00	105.500,00
06-Aug-19	Faktor No	BKK	resolusi	1-213 1-111	75.000,00	30.500,00
					111.000,00	80.500,00
						30.500,00

Organisasi mampu merespons perubahan dengan cepat dan adaptif, memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Kepuasan karyawan meningkat melalui kejelasan kebijakan, kesempatan pengembangan, dan atmosfer kerja yang positif. Dengan transparansi yang meningkat, karyawan merasa lebih terlibat dalam proses manajemen SDM, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, terbuka, dan mendukung pertumbuhan individu (Rahayu & Anas, 2023).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan laporan arus kas secara keseluruhan berjalan dengan lancar, antusiasme dari pengelola BUMDESA sangat besar sehingga mempermudah kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pendampingan ini semoga dapat membantu pengelolaan keuangan BUMDESA Desa Tlogosari dalam menyusun dan memahami pentingnya laporan arus kas. Kegiatan ini perlu dukungan penuh oleh sumber daya manusia baik pengelola BUMDESA maupun Desa Tlogosari. Fasilitas BUMDESA yang maksimal seperti adanya komputer sangat dapat dimaksimalkan, sehingga perlunya pengembangan keterampilan dapat terus dilakukan secara berkala supaya menimbulkan kebiasaan dan semakin terasa mudah dalam memasukkan transaksi menggunakan komputer. Pencatatan transaksi yang masih terus membutuhkan latihan sehingga bisa memenuhi standar akuntansi yang dipakai dan sesuai peraturan dalam melakukan pelaporan BUMDESA.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, E. Yusuf; Fitrié Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13, (7), 67-81

Asnahwati, A., & Risman, R. (2018). Model tata kelola keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Wanita. *Jurnal Daya Saing*, 4(2), 259–268.

- Dwiningwarni, S.S. & Amrulloh, A.Z. (2020). Peranan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jombang Jawa Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 4, (1), 1-20. DOI: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128
- Firdausi, N. J. and Adriansyah, A. A. (2018) "Pengenalan Perencanaan Program Desa Berbasis Bukti Di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Community Development Journal*, 2(1). pp. 82-89
- Hadiyat, Y. (2016) "Peran Bumdes Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Bumdes Mugirahayu, Desa Lebak Herang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)", *Jurnal Manajemen* (Edisi Elektronik), 9(1), pp. 71-84.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Center for Academic Publishing Service.
- Hood, C (1991). "A Public Management for All Seasons?". *PublicAdministration*. 69 (1): 3–19.
- Ibrahim, I., Sutarna, I., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019) "Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat", *Sosiohumaniora*, 21(3), 349-354.
- Irawati, D. & Martanti, D. E. (2017). Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)* – Jember, 27-28 Oktober 2017, hal 41-51.
- Marala, R., Wibowo, H., & Kurniawan, R. (2019) "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima)". *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), pp. 107-134
- Musafa,., Hernawan, Y. & Dewi, S. W.K. 2018. Workshop Manual & Digital Accounting Pada Badan Usaha Milik Desa Girimekar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat BSI*, 1, (2), 322-333
- Nurhayati. (2021). The Empowerment Of Housewives Through The Development Of Various Processed Bananas In The Murung Raya Sub-District: Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pengembangan Berbagai Olahan Pisang Di Kelurahan Murung Raya. *Community Development Journal*, 5(3), 288–292.
- Oktaviani, L., Nusawantara, D.A. (2020). Keterterapan prinsip-prinsip pengendalian internal dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Sidoarjo. *Matra Pembaharuan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 4, (2), 83-92
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., & Butarbutar, M. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.

- Rahayu, P. T., & Anas, Y. A. (2023). OPTIMALISASI KINERJA BUMDESMA "ALASKA" KECAMATAN KABUH MELALUI PEMBUATAN SOP MSDM. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.3No 1, April2023, pp. 10-19
- Resti, Ayu. (2019). Prosedur Pengelolaan Keuangan BUMDes. <https://blog.bumdes.id/2019/08/prosedur-pengelolaan-keuangan-bumdes/>. Diakses pada 21 Januari 2023 pukul 11.20
- Sinollah, S. (2019). Tatakelola Wilayah Sumber Mata Air Tirta Arum, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. *Community Development Journal*, 3(2), 71–81. <https://doi.org/10.33086/cdj.v3i2.1069>
- Titioka, B.M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F.N. & Siahainenia, A.J.D. (2020). Pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manajemen dan Akuntansi* 3, (1), 197-216.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Wijaya, D. (2017). *Manajemen keuangan konsep dan penerapannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia

PENDAMPINGAN TATA KELOLA KEUANGAN PADA BUMDES DESA TLOGOSARI KEC.TIRTOYUDO

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ prezi.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off